

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum. Hukum sebagai garda terdepan penegak keadilan yang berimplikasi terhadap kehidupan bernegara di Indonesia yang termaktub dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.¹. Negara hukum mempunyai arti bahwa Indonesia merupakan negara yang memegang teguh dan menjunjung tinggi hukum dengan berlandaskan hukum yang ada dalam melaksanakan pemerintahannya, tanpa melihat kekuasaan semata. Segala perbuatan diatur oleh hukum yang dibentuk oleh penguasa yang berwenang. Hukum bersifat memaksa dan mengikat serta wajib untuk dipatuhi.

Salah satu instrument hukum yang ada di Indonesia adalah hukum pidana, dalam hukum pidana dikenal asas legalitas. Asas Legalitas (*Principle of Legality*) yang dapat disimpulkan melalui pasal 1 ayat 1 KUHP mempunyai makna “ *nullum delictum, nulla poena sine praeviae legis poenali* “(tiada delik, tiada pidana tanpa peraturan yang mengancam pidana terlebih dulu).”² Hukum pidana itu sendiri dalam perkembangannya tidak mampu dan tidak dapat mengatur suatu pelanggaran ataupun kejahatan yang terjadi akibat perkembangan tingkah laku masyarakat. Oleh karena itu muncul hukum pidana khusus yang salah satu tujuannya adalah mengisi kekosongan hukum yang tidak dapat diatur oleh hukum pidana umum, salah satu hukum pidana khusus yang ada di Indonesia adalah aturan hukum pidana yang terdapat dalam ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

¹ Indonesia adalah negara hukum (dalam bagian penjelasan Pasal 1 ayat 3 UUD 1945)

² Indriyanto Seno Adji, 2006, *Korupsi Dan Pembalikan Beban Pembuktian* Jakarta : Oemar Seno Adji & Rekan, hal 11.

Dewasa ini muncul suatu istilah yang dinamakan dengan Fidusia. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.³ Ketentuan perihal jaminan kebutuhan yang sangat besar dan terus meningkat bagi dunia usaha atas tersedianya dana, perlu diimbangi dengan adanya ketentuan hukum yang jelas dan lengkap yang mengatur mengenai lembaga jaminan.⁴ Untuk memenuhi kebutuhan hukum yang dapat lebih memacu pembangunan nasional untuk menjamin kepastian hukum bagi pihak yang berkepentingan, maka perlu dibentuk ketentuan yang lengkap mengenai Jaminan Fidusia dan Jaminan tersebut perlu didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia⁵. Jaminan Fidusia kemudian diundangkan di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Undang-Undang Jaminan Fidusia membuka peluang seluas-luasnya bagi pembebanan jaminan terhadap benda bergerak, yang berwujud maupun tidak berwujud, serta benda tidak bergerak, juga memuat prosedur tata cara melakukan Jaminan Fidusia dan terdapat aturan mengenai lembaga Jaminan Fidusia, yang pada peraturan jaman dahulu tidak memuat persoalan ini.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia merupakan respon pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat terhadap berbagai macam lembaga jaminan kebendaan, karena bentuk-bentuk perjanjian pinjam meminjam uang atau perjanjian kredit dengan jaminan kebendaan yang telah ada seperti Hak Tanggungan, Hipotek, dan Gadai dianggap belum mengakomodasi

³ Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

⁴ <https://sleepingfailure.wordpress.com/2014/07/19/sejarah-perkembangan-Fidusia-di-indonesia/> diakses pada tanggal 1 Februari 2017 Pukul 20.03 WIB

⁵ Huruf c Konsiderans Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

kebutuhan masyarakat terhadap lembaga jaminan kebendaan, selain itu memberikan status yang jelas bagi lembaga pembiayaan di Indonesia yang selama ini dikonstruksikan dalam berbagai bentuk seperti “Jual beli dengan Hak Membeli Kembali⁶”.

Undang-undang nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pasal 2 berbunyi :

“Jaminan Fidusia berlaku terhadap setiap perjanjian yang bertujuan untuk membebani Benda dengan Jaminan Fidusia.”

Perjanjian yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia merupakan perjanjian Fidusia. Perjanjian Fidusia adalah perjanjian hutang piutang kreditur kepada debitur yang melibatkan penjaminan. Jaminan tersebut kedudukannya masih dalam penguasaan pemilik jaminan. Tetapi untuk menjamin kepastian hukum bagi kreditur maka dibuat akta yang dibuat oleh Notaris dan wajib didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia.⁷ Hal ini ditegaskan didalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang berbunyi :

1. Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan.
2. Dalam hal Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia berada di luar wilayah negara Republik Indonesia, kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tetap berlaku.

Tidak dilaksanakannya pendaftaran Fidusia ini dapat menimbulkan hal – hal yang tidak sehat dalam praktek, seperti adanya Fidusia dua kali tanpa

⁶ <http://lampung.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/2334-kemenkumham-lampung-selenggarakan-sosialisasi-layanan-jaminan-Fidusia> diakses tanggal 4 Februari 2017 pukul 12.06 WIB

⁷ <https://www.google.co.id/search?sourceid=chrome-psyapi2&ion=1&espv=2&ie=UTF-8&q=pengertian%20perjanjian%20Fidusia&oq=pengertian%20perjanjian%20fidusi&aqs=chrome.0.0j69i57j0l3.6163j0j7> diakses tanggal 1 Februari 2017 pukul 20.54 WIB

sepengetahuan krediturnya, adanya pengalihan barang Fidusia tanpa sepengetahuan kreditur, dan lain – lain.⁸

Sebelum dibuatkannya akta Jaminan Fidusia oleh Notaris, antara kreditur dan debitur membuat perjanjian yang dibuat dibawah tangan dan perjanjian tersebut menjadi Undang-Undang bagi mereka sendiri. Perjanjian itu umumnya disebut sebagai perjanjian pembiayaan yang kemudian setelah dibuatkan Akta dihadapan Notaris perjanjian tersebut umumnya menjadi Akta Jaminan Fidusia. Akta Jaminan Fidusia umumnya memuat hal-hal yang diatur seperti yang dijelaskan pada pasal 6 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, antara lain :

- a. identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia;
- b. data perjanjian pokok yang dijamin Fidusia;
- c. uraian mengenai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia;
- d. nilai penjaminan; dan
- e. nilai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengatur segala hal tentang Fidusia mulai dari tatacara proses pendaftaran Fidusia, objek Jaminan Fidusia, ruang lingkup dan ketentuan pidana atau sanksi pidana yang timbul karena pelanggaran atas tindakan yang melanggar ketentuan yang diatur didalam Undang-Undang Jaminan Fidusia. Salah satu ketentuan pidana atau sanksi pidana yang terdapat pada Undang–Undang nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dimuat didalam Pasal 36 yang berbunyi :

“Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) rupiah.”

⁸ Munir Fuady, 2000, *Jaminan Fidusia*, PT. Citra aditya bakti, Bandung, hal. 29

Pasal 23 ayat (2) berbunyi :

“Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia.”

Perjanjian pembiayaan pada umumnya mengatur tegas tentang ketentuan yang diatur didalam pasal 23 ayat (2) dan pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Namun dalam perkembangannya Perjanjian pembiayaan ini seringkali disimpangi oleh Pemberi Fidusia dengan melakukan tindakan yang dilarang dalam pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Hal ini membuktikan bahwa Pemberi Fidusia tersebut telah melanggar ketentuan yang diatur didalam perjanjian pembiayaan yang dibuat, dan dalam hal ini dianggap telah melakukan tindakan wanprestasi dan dapat dipidana.

Banyak kasus yang terjadi di Indonesia, contoh kasus yang terjadi adalah:

1. Terdakwa atas nama Mustofa Ahmad Bin Bawadi Ahmad pada tanggal 26 februari 2014, mustofa hendak mengajukan aplikasi permohonan kredit berupa 1 unit truk kepada PT. Mandiri Tunas Finance. Permohonan kredit tersebut terdakwa ajukan berdasarkan ide dari Budi laksono. Sebenarnya Mustofa dalam mengajukan kredit hanya berperan sebagai atas nama saja karena merasa kasihan dengan Budi Laksono yang usahanya sedang mengalami kebangkrutan. dilakukan survey oleh PT. Mandiri Tunas Finance, permohonan kredit terdakwa disetujui karena terdakwa punya usaha transportasi dan ditindaklanjuti dengan penandatanganan perjanjian pembiayaan

konsumen pada hari kamis tanggal 22 Mei 2014 di PT Mandiri Tunas Finance. Kemudian pada tanggal 26 Mei 2015 terdakwa menerima satu unit hono duntro 130 HD 6,8 PS bak kayu warna hijau tahun 2014 dari PT. Mandiri Tunas Finance, setelah menerima kendaraan tersebut kemudian terdakwa serahkan secara operkredit kepada saudara Budi Laksono. (No.330/Pid.Sus/2015/PN.Smn).⁹

2. Terdakwa atas nama Rio Chandra Bin Nurani Bramantya, pada bulan Februari 2014 Rio disuruh oleh Hari Ompong yang masih menjadi Daftar Pencarian Orang untuk mengambil sepeda motor ke dealer Honda secara kredit menggunakan atas namanya dan hari Ompong menjanjikan akan memberikan imbalan sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Rio pada saat itu menyetujuinya. Kemudian terdakwa datang kesalah satu dealer honda di daerah Purworejo lalu mengajukan aplikasi kredit kepemilikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda New Vario Techno FI Noka : MH1JFB127EK276762 Nosin : JFB1E2228873 warna hitam putih, kemudian seolah-olah dilakukan survei oleh Ade Kukilo yang juga masih dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), yang pembiayaannya kredit kepemilikan sepeda motor tersebut dibiayai oleh PT. ADIRA FINANCE dengan angsuran perbulan yang dikenakan kepada Terdakwa sebesar Rp. 530.000,- (Lima Ratus tiga puluh ribu rupiah). Setelah Rio mendapatkan sepeda motor tersebut rio dihubungi oleh agung yang merupakan orang suruhan Hari Ompong, kemudian Rio

⁹<https://jurnal.usu.ac.id/index.php/jmpk/article/viewFile/17695/7512> diakses pada 5 September 2017 Pukul 15.01 WIB

mengoperalihkan sepeda motor tersebut kepada Agung tanpa pemberitahuan secara resmi terlebih dahulu kepada pihak PT. Adira Finance. (No. 15/Pid.Sus/2015/PN.Pwr)¹⁰

3. Bahwa pada tanggal 30 April 2014 terdakwa membeli 1 (satu) unit mobil Suzuki Grand Vitara JLX MT BA 1049 AN warna Hitam Metalik nomor rangka MHYJTE54V6J-101126 nomor mesin J20AID-201691 tahun pembuatan 2006 secara leasing melalui PT. Adira Finance seharga Rp.174.959.995 (seratus tujuh puluh empat juta Sembilan ratus lima puluh Sembilan ribu Sembilan ratus Sembilan puluh lima rupiah), yang pada saat tersebut disepakati uang muka/DP sebesar Rp.52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga sisa hutang yang harus di bayar oleh terdakwa sebesar Rp.122.959.995,- (seratus dua puluh dua juta Sembilan ratus lima puluh Sembilan ribu Sembilan ratus Sembilan puluh lima rupiah) dengan lamanya waktu kontrak pembiayaan dengan PT. Adira Finance atas pembelian mobil tersebut selama 4 (empat) tahun atau selama 48 bulan sedangkan angsuran perbulannya sebesar Rp.3.645.000,- (tiga juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah), kemudian terdakwa tidak boleh menukar atau merubah bentuk unit yang mengakibatkan turunnya harga unit, terdakwa tidak boleh memindahtangankan unit kepada pihak lain tanpa seizin tertulis dari pihak PT. Adira Finance selama masa kredit. selanjutnya pada tanggal 6 Mei 2014 di buat Jaminan Fidusia terhadap 1 (Satu) unit mobil Suzuki Grand Vitara JLX

¹⁰ <https://jurnal.usu.ac.id/index.php/jmpk/article/viewFile/17695/7512> diakses pada 5 September 2017 Pukul 15.04 WIB

MT BA 1049 AN warna Hitam Metalik tersebut yang ditandatangani dihadapan Notaris Dra. Butet, SH dengan Akta Jaminan Fidusianya nomor 17 tanggal 6 Mei 2014 selanjutnya didaftarkan dengan nomor registrasi pendaftaran 2014050913100087 dan dengan sertifikat Jaminan Fidusinyaa nomor : W.3.00062295.AH.05.01 Tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014. Selanjutnya setelah terdakwa membayar cicilan pembelian mobil Suzuki Grand Vitara tersebut sebanyak 10 (sepuluh) kali cicilan kepada PT. Adira Finance dengan total sebesar Rp.36.450.000,- (tiga puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa tidak sanggup lagi membayar angsuran cicilan 1 (satu) unit mobil Suzuki Grand Vitara JLX MT BA 1049 AN warna Hitam Metalik kepada PT. Adira Finance lalu pada tanggal 6 Desember 2014 terdakwa mengatakan kepada anak terdakwa yaitu saksi DIDING GRIMON Pgl DIDING dengan mengatakan “Kalau memang mobil tersebut tidak mau di pakai lagi maka jual sajalah mobil tersebut dari pada nantinya mobil tersebut di tarik oleh pihak Adira”, atas perkataan terdakwa tersebut kemudian pada tanggal 13 Desember 2014 sekitar pukul 14.00 wib saksi DIDING GRIMON Pgl DIDING menjual 1 (satu) unit mobil Suzuki Grand Vitara JLX MT BA 1049 AN warna hitam Metalik Nomor Rangka MHYJTE54V6J-101126 Nomor Mesin J20AID-201691 dengan harga mobil sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) di Shoowroom Smile Jaya Utama milik saksi FIRMAN SETIAWAN Pgl WAWAN yang beralamat di Jalan Juanda No.25 A Kecamatan Padang Barat Kota

Padang. Bahwa ia terdakwa bersama-sama dengan saksi DIDING GRIMON Pgl DIDING tidak memiliki izin tertulis dari Pihak PT. Adira Finance untuk mengalihkan 1 (Satu) unit mobil Suzuki Grand Vitara JLX MT BA 1049 AN warna Hitam Metalik nomor rangka MHYJTE54V6J-101126 nomor mesin J20AID-201691 kepada saksi FIRMAN SEIAWAN Pgl WAWAN dan atas perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi DIDING GRIMON Pgl DIDING PT. Adira Finance mengalami kerugian sebesar Rp.86.009.000,- (delapan puluh enam juta Sembilan ribu rupiah). (3/Pid.Sus/2016/PN Pdg)¹¹

4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 juli 2014 bertempat di Kantor PT. ADIRA MULTI FINANCE Padang Jalan Juanda Nomor 8 Padang antara terdakwa yang disetujui oleh istri terdakwa dengan Saudara Yose Andreas dalam kedudukannya untuk dan atas nama PT. ADIRA DINAMIKA FINANCE telah mengadakan perjanjian pembiayaan dengan penyerahan hak milik secara Fidusia Nomor 065714800754 tanggal 26 Juli 2014 benda berupa 1 (satu) unit Mobil Suzuki Ertiga BA 1059 QA Tahun 2014 dengan Nomor Rangka MHYKZE81SEJ227271, Nomor Mesin K14BT1130575 BPKB atas nama REFFI SURIANY dengan nilai objek sebesar Rp. 187.500.000,- (Seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan cicilan sebesar Rp. 4.560.000,- (Empat Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) perbulannya dengan ketentuan biaya pembelian kendaraan tersebut dibiayai oleh PT. ADIRA DINAMIKA FINANCE selaku

¹¹ http://pn-padang.go.id:8070/list_perkara diakses pada 19 September 2017 pukul 06.44

pemilik kendaraan sesuai dengan perjanjian pembiayaan dimaksud, tetapi kendaraan tersebut tetap berada pada dan dalam penguasaan terdakwa selaku Pemberi Fidusia dengan hak pinjam pakai. Namun sejak bulan Mei Tahun 2015 terdakwa tidak lagi membayar cicilan terhadap kendaraan tersebut. Setelah pihak Penerima Fidusia yakni saksi Beni Rantauan bersama-sama dengan saksi Sonia Beni mendatangi rumah terdakwa di Asrama Polisi SPN Padang Besi, terdakwa menyampaikan ketidaksanggupan untuk membayar cicilan mobil Ertiga NoPol. BA 1069 QA tersebut. Pada saat itu terdakwa juga menyampaikan niat terdakwa kepada saksi Beni Rantauan dan saksi Sonia Beni untuk mengalihkan/over kredit mobil Ertiga tersebut dimana terdakwa sudah mengambil tindakan permulaan dengan mengiklankan mobil tersebut di situs jual beli online Toko Bagus/OLX. Mengetahui niat terdakwa tersebut, saksi Beni Rantauan dan Sonia Beni menyampaikan bahwa untuk pengalihan mobil tersebut harus sepengetahuan PT. Adira Finance selaku leasing/lembaga pembiayaan yang membiayai pembelian mobil tersebut. Pada saat itu terdakwa menyatakan memahami aturan tersebut dan menyanggupi untuk mengalihkan mobil tersebut dengan sepengetahuan pihak PT. Adira. Namun, terdakwa tetap mengalihkan mobil tersebut kepada orang lain dan selanjutnya sekira bulan Juni 2015, terdakwa mengajak saksi Beni Rantauan untuk bertemu di depan gerbang SPN Padang Besi, sekira pukul 01.00 atas permintaan terdakwa. Saksi Beni Rantauan kemudian memenuhi permintaan terdakwa dengan

mendatangi terdakwa bersama-sama dengan saksi Sonia Beni. Dalam pertemuan tersebut, terdakwa mengatakan bahwa mobil sudah dialihkan dan tidak lagi berada dalam penguasaan terdakwa., karena mobil tersebut dialihkan / diserahkan kepada saksi Afrinaldi Pgl Jek selaku collector Eksternal PT. ADIRA FINANCE dimana saat itu terdakwa menerima uang sebanyak Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dari saksi tersebut.. Setelah dikonfirmasi kepada saksi Afrinaldi Pgl Jek ternyata saksi mengakui tidak pernah menerima kendaraan berupa 1 (satu) unit Mobil Ertiga tersebut, sedangkan pihak PT. ADIRA DINAMIKA FINANCE juga tidak pernah menerima 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga tersebut dari terdakwa. Bahwa 1 (satu) unit mobil Ertiga NoPol. BA 1069 QA yang terdakwa alihkan tersebut, pembeliannya dibiayai oleh PT. Adira Finance sebagaimana yang tertuang di dalam perjanjian pembiayaan Nomor: 065714200754 tanggal 26 Juli 2014, yang kemudian dibuatkan Akta Jaminan Fidusia dari Notaris Harti Virgo Putri sesuai Akta Nomor:71 tanggal 13 Agustus 2014, dan sudah didaftarkan kepada Kementerian Hukum dan Ham berdasarkan Akta Fidusia Nomor: W3.00101396.AH.05.01 tanggal 21 Agustus 2014. Bahwa terdakwa pada waktu mengalihkan 1 (satu) unit mobil Ertiga BA 1069 QA kepada pihak lain dilakukantampa persetujuan tertulis dari pihak PT. Adira Finance dan atas perbuatan terdakwa tersebut, pihak PT. Adira Finance dirugikan sebesar Rp. 179.149.724,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Seratus

Empat Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Rupiah).
(234/Pid.Sus/2016/PN Pdg)¹²

Berdasarkan contoh kasus diatas, dapat dilihat bahwa terdapat pelanggaran terhadap Pasal 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia yaitu berupa pengalihan terhadap objek yang menjadi Jaminan Fidusia yang sudah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia, dimana pengalihan objek Jaminan Fidusia terjadi ketika masih terikat dalam masa perjanjian pembiayaan berlangsung. Maka dalam hal ini pihak kreditur selaku Penerima Fidusia dapat mempidanakan pihak debitur selaku Pemberi Fidusia sesuai yang diatur didalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Namun pada kenyataannya, untuk penyelesaian kasus-kasus yang terjadi seperti diatas perusahaan pembiayaan atau para pihak lebih cenderung menempuh jalur atau cara penyelesaian perselisihan dengan cara musyawarah terlebih dahulu, dan jika cara musyawarah tersebut tidak menemukan titik terang baru lah para pihak/ salah satu pihak menempuh jalur hukum. Jadi juga terlihat bahwa pada kenyataannya hukum pidana dijadikan *ultimum remidium* dalam kasus seperti diatas.

Dengan banyaknya kasus yang terjadi di Indonesia, menurut penulis masyarakat di Indonesia masih banyak yang belum mengerti dan paham terhadap aspek aspek pidana yang ada dalam Undang-Undang Fidusia.

Berdasarkan uraian diatas, penulis berniat melakukan pembahasan dengan judul **“PENYELESAIAN DUGAAN PELANGGARAN PASAL 36 UNDANG -**

¹² http://pn-padang.go.id:8070/list_perkara diakses pada 19 September 2017 pukul 06.49 WIB

UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA (Studi Pada PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk. Cabang Padang)”.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana langkah-langkah yang ditempuh Penerima Fidusia dalam penyelesaian kasus dugaan pelanggaran Pasal 36 Undang - Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang dilakukan oleh Pemberi Fidusia pada PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk. Cabang Padang?
2. Bagaimana dasar pertimbangan Penerima Fidusia dalam penyelesaian kasus dugaan pelanggaran Pasal 36 Undang - Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang dilakukan oleh Pemberi Fidusia pada PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk. Cabang Padang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui langkah-langkah yang ditempuh Penerima Fidusia dalam penyelesaian kasus dugaan pelanggaran Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang dilakukan oleh Pemberi Fidusia pada PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk. Cabang Padang.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Penerima Fidusia dalam penyelesaian kasus dugaan pelanggaran Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang dilakukan oleh Pemberi Fidusia pada PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk. Cabang Padang.
- 3.

D. Manfaat Penelitian

Ada beberapa hal yang merupakan manfaat penelitian ini, antara lain :

1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan bidang hukum pidana pada khususnya.
- b. Menerapkan ilmu teoritis yang di dapatkan di bangku perkuliahan dan menghubungkannya dengan kenyataan yang ada di masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan agar hasil penelitian ini dapat menjadi bahan referensi oleh mahasiswa, dosen, praktisi hukum, aparat penegak hukum dan masyarakat, dalam rangka meningkatkan pemahaman mengenai tindakan pengalihan yang dilarang oleh Undang–Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Penegakan Hukum

Menurut Jimly Asshiddiqie, Penegakan Hukum dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (*alternative disputes or conflicts resolution*), sedang dalam arti sempit, penegakan hukum itu menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan

terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya yang lebih sempit lagi melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran aparat kepolisian, kejaksaan, advokat atau pengacara, dan badan-badan peradilan.¹³

Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, melahirkan dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁴ Dapat dikatakan bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi apabila ada ketidakserasian antara "tritunggal" nilai, kaidah dan pola perilaku, gangguan tersebut terjadi apabila ada ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.¹⁵

Dalam penegakan hukum ada 3 (tiga) unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu :¹⁶

1. Kepastian hukum.
2. Kemanfaatan.
3. Keadilan.

¹³ Syafrinal. 2017. *Kedudukan Putusan Hakim Dalam Perkara Poligami Dan Hubungannya Dengan Asas Nebis In Idem (Studi kasus di Pengadilan Negeri Pasaman Barat)*. Masters thesis, Universitas Andalas.

¹⁴. Soerjono Soekanto, 2012, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, hal. 5

¹⁵ *Ibid*, hal. 5

¹⁶ Sudikno Mertokusumo Dan A.Pitlo, 1993, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Yogyakarta : PT.Aditya Bakti, hal 1

Menurut Freidmann, berhasil atau tidaknya Penegakan hukum bergantung pada: Substansi Hukum, Struktur Hukum / Pranata Hukum dan Budaya Hukum, yakni :¹⁷

1. Subtansi Hukum

Substansi hukum adalah keseluruhan asas-hukum, norma hukum dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan

2. Struktur Hukum

Struktur hukum adalah keseluruhan institusi penegakan hukum, beserta aparatnya. Jadi mencakupi: kepolisian dengan para polisinya; kejaksaan dengan para jaksanya; kantor-kantor pengacara dengan para pengacaranya, dan pengadilan dengan para hakimnya

3. Budaya Hukum

Adalah kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara berpikir dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat. Substansi dan aparaturnya saja tidak cukup untuk berjalannya sistem hukum, oleh karenanya, Lawrence M. Friedman menekankan kepada pentingnya Budaya Hukum (*Legal Culture*).

Muladi, mengemukakan, penggunaan upaya hukum (termasuk hukum pidana) sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum.¹⁸ Sudarto berpendapat bahwa dalam kebijakan penegakan hukum dalam rangka

¹⁷ <https://masalahukum.wordpress.com/2013/10/05/teori-penegakan-hukum/> diakses pada 1 Februari 2017 pukul 21.04 WIB

¹⁸ H. Sugeng Tiyyarto, 2015, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian*, Genta Press, Yogyakarta, hal. 9

penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana harus diperhatikan hal-hal berikut:¹⁹

1. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiel spiritual berdsarkan Pancasila; sehubungan dengan ini maka (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan pengurangan terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.
2. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (material dan atau spiritual) atas warga masyarakat.
3. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil.
4. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas.

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu

,²⁰

1. *Total Enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana *substantive*. Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang

¹⁹ *Ibid*, hal. 10

²⁰ *Ibid*, hal. 11-13

antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana *substantive* itu sendiri memberikan batasan batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik delik aduan. Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.

2. *Full Enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total itu dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
3. *Actual enforcement*, hal ini dianggap sebagai *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

b. Teori Pidana

Ada berbagai macam pendapat mengenai teori pidana ini, namun yang banyak itu dapat dikelompokkan ke dalam tiga golongan besar, yaitu :²¹

1. Teori Absolut

Dasar pijakan dari teori ini adalah pembalasan. Negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat tersebut telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan

²¹ Adami Chazawi, 2013, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT. RajaGrafindo Persada, hal. 157 - 168

hukum (pribadi, masyarakat atau negara) yang telah dilindungi. Oleh karena itu dia harus diberikan pidana yang setimpal dengan perbuatan (berupa kejahatan) yang dilakukannya. Penjatuan pidana yang pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain.

2. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Teori relatif atau teori tujuan berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana ialah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana. Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat, maka pidana mempunyai tiga macam sifat yaitu :

- a. bersifat menakut – nakuti (*afschrikking*)
- b. bersifat memperbaiki (*verbetering / reclasering*)
- c. bersifat membinasakan (*onschadelijk maken*)

3. Teori Gabungan

Teori ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar penjatuan pidana. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu sebagai berikut:

- i. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang

perlu dan cukup untuk dapat dipertahkannya tata tertib masyarakat.

- ii. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

Sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti, bahwa teori pembedaan dapat digunakan sebagai bahan analisis terhadap jaminan dan perjanjian Fidusia. Dengan perjanjian Fidusia muncul suatu ikatan yang mana debitur berjanji untuk tidak mengalihkan, menyewakan, menggadaikan dan memindahtangankan objek Jaminan Fidusia tanpa persetujuan tertulis dari kreditur. Kewajiban para pihak dalam perjanjian Fidusia perlu ditaati oleh para pihak (kreditur dan debitur), dan apabila para pihak tidak dapat mentaati, maka untuk semua pihak yang terkait dapat dipidana, dan mencakup pada pengertian bahwa kewajiban tersebut tidak mendiskriminasikan salah satu pihak. Dalam praktik dimasyarakat, perjanjian Jaminan Fidusia seringkali menimbulkan permasalahan, setelah dibuatnya perjanjian Jaminan Fidusia adalah debitur tidak melakukan kewajibannya untuk membayar utangnya, dan tanpa persetujuan tertulis dari pihak kreditur, debitur melakukan perbuatan pengalihan benda objek Jaminan Fidusia kepada pihak lain.

c. Teori Perjanjian

Pada dasarnya perjanjian dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak. Berdasarkan Pasal 1313 KUH Perdata : “Perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

Syarat sah nya perjanjian berdasarkan pasal 1320 KUHPerdata, berbunyi :

“ Untuk sah nya persetujuan – persetujuan diperlukan 4 (empat) syarat :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian;
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal.”

Kedua syarat yang pertama dinamakan syarat subjektif, karena kedua syarat tersebut mengenai subjek perjanjian sedangkan kedua syarat terakhir disebutkan syarat objektif, karena mengenai objek perjanjian.²².

Asas konsensualisme yang terdapat di dalam pasal 1320 KUHPerdata mengandung arti kemauan “will” para pihak untuk saling berpartisipasi, ada kemauan untuk saling mengikatkan diri.²³. Asas konsensualisme ini mempunyai hubungan yang erat dengan asas kebebasan berkontrak dan asas kekuatan mengikat yang terdapat dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, ketentuan ini berbunyi:²⁴

“semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang – Undang bagi mereka yang mengikatnya”

Di dalam perkembangannya, asas kebebasan berkontrak ini semakin sempit dilihat dari beberapa segi, yaitu :

1. Dari segi kepentingan umum;

²² Mariam Darus Badruzaman, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 73

²³ *Ibid.* hal. 83

²⁴ *Ibid.* hal. 84

2. Dari segi perjanjian baku;
3. Dari segi perjanjian dengan pemerintah.²⁵

Pada perjanjian tertentu tidak cukup dengan adanya kesepakatan atau konsensus, namun diikuti dengan adanya formalitas tertentu untuk lahirnya perjanjian. Perjanjian ini merupakan perjanjian formil. Perjanjian ini lahir jika terpenuhinya formalitas tertentu, seperti halnya pengalihan hak dalam Jaminan Fidusia yang harus memenuhi formalitas tertentu.

2. Kerangka Konseptual

a. Penyelesaian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penyelesaian berasal dari kata selesai yang artinya; sudah jadi apa yang dibuat.²⁶ Penyelesaian memiliki arti; proses, cara, perbuatan, menyelesaikan (dalam berbagai-bagai arti seperti pemberesan, pemecahan).

b. Dugaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dugaan berasal dari kata duga yang memiliki arti; menyangka, dan dugaan memiliki artian; hasil menduga, ajukan, sangkaan.²⁷

c. Pelanggaran

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pelanggaran berasal dari kata langgar yang artinya; bertentangan, melanggar, melanda, menumbuk, menyerang menyalahi aturan, undang-undang, hukum dan sebagainya,

²⁵ *Ibid.* hal. 87

²⁶ Tri Rama K, *Kamus lengkap bahasa Indonesia*, Mitra Pelajar, Surabaya, hal 459.

²⁷ *Ibid*, hal. 129

melawan hak pernjian dan sebagainya.²⁸ Sedangkan Pelanggaran memiliki artian; perbuatan melanggar.

d. Jaminan Fidusia

Berdsarkan Pasal 1 Undang – Undang nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, berbunyi :

“Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya.”

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Dalam penulisan Penelitian ini, maka pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis (*socio legal research*) yaitu mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam kehidupan yang nyata.²⁹ Terkait dalam penelitian, penulis berupaya melihat penyelesaian dugaan pelanggaran Pasal 36 Undang - Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang dilakukan oleh Pemberi Fidusia pada PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk. Cabang Padang.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu dimaksudkan untuk memberikan data tentang manusia atau gejala lainnya.³⁰ Terkait dalam penelitian, penulis

²⁸ *Ibid*, hal. 299

²⁹ Soejono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), hal 51.

³⁰ *Ibid*, hal. 10

berupaya melihat penyelesaian dugaan terhadap pelanggaran Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang dilakukan oleh Pemberi Fidusia pada PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk. Cabang Padang.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

i. Data Primer

Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku warga masyarakat³¹, yang diperoleh di lapangan dengan mewawancarai Head of Litigation PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk. Cabang Padang.

ii. Data Sekunder

Data sekunder, antara lain, mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya.³²

Data tersebut berupa:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum pendukung utama atau bisa juga dikatakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Bahan hukum primer berupa ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan materi skripsi penulis dan juga berkaitan dengan permasalahan

³¹ *Ibid*, hal. 12

³² *Loc.cit*

hukum yang akan dipecahkan. Bahan hukum primer diantaranya adalah:

- a. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- d. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- e. Undang – Undang nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.
- g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130 Tahun 2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya rancangan undang – undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.³³ Dalam penellitian ini terdiri dari doktrin,

³³ *ibid* hal. 52

yurisprudensi, dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan judul skripsi tersebut di atas.

3. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder ; contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.³⁴ Dalam penelitian ini terdiri dari Kamus Umum Bahasa Indonesia, kamus hukum, buku literature, hasil karya dari kalangan hukum, majalah, koran, media cetak dan elektronik.

b. Sumber Data

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian Kepustakaan dilakukan di berbagai perpustakaan yaitu :

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- b. Perpustakaan Pusat Universitas Andalas

“Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*) yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.”³⁵

2. Penelitian lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan pihak yang berkaitan dengan objek penelitian, yang dapat diperoleh langsung dilapangan dengan tujuan untuk memperoleh data yang

³⁴ *Ibid* hal. 52

³⁵ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika. Jakarta : 2009, hlm. 107

relevan dengan masalah penelitian. Penelitian lapangan dilakukan di Kantor PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk. Cabang Padang.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen-dokumen yang ada serta juga melalui data tertulis. Dalam hal ini dilakukan guna memperoleh literatur-literatur yang berhubungan dan berkaitan dengan judul dan permasalahan yang di rumuskan.

b. Wawancara

Menurut Koentjaraningrat :³⁶

“Wawancara adalah cara yang digunakan untuk tugas tertentu, mencoba untuk mendapatkan informasi dan secara lisan pembentukan responden, untuk berkomunikasi tatap muka.”

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu, dan tujuan ini dapat bermacam-macam. Dalam hal penelitian hukum untuk mengumpulkan keterangan serta pendapat³⁷. Untuk mendapatkan data primer, dengan menggunakan pedoman pertanyaan dengan pihak terkait sebagai pegangan dalam wawancara, dalam penelitian ini yaitu Bapak Fernando Chandra selaku Head Of Litigation PT. Adira

³⁶ <http://www.gurupendidikan.com/8-jenis-bentuk-dan-pengertian-wawancara-menurut-para-ahli-beserta-contohnya/> diakses pada tanggal 2 Februari 2017 pukul 11.08 WIB

³⁷ Burhan Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, hal 95.

Dinamika Multi Finance. Wawancara dilakukan dengan membuat daftar pertanyaan sehingga wawancara menjadi jelas dan terarah.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap dipakai untuk di analisis. Dalam penelitian ini setelah data yang diperlukan berhasil diperoleh, maka penulis melakukan pengolahan terhadap data tersebut. Pengolahan data dilakukan dengan cara, data yang di peroleh dari penelitian kepustakaan dan lapangan dengan cara mencatat atau merekam akan di teliti dan dilakukan pengeditan terlebih dahulu guna mengetahui apakah data-data yang diperoleh tersebut sudah lengkap. Hal ini dilakukan untuk mendukung pemecahan atas masalah yang diteliti.

b. Analisis Data

Analisis data sebagai tindak lanjut proses pengolahan data, untuk dapat memecahkan dan menguraikan masalah yang akan diteliti berdasarkan bahan hukum yang diperoleh, maka diperlukan adanya teknik analisa bahan hukum.

Setelah data-data yang diperlukan, maka penulis melakukan analisis secara kualitatif yakni dengan melakukan penilaian terhadap data-data yang penulis dapatkan di lapangan dengan bantuan literatur-literatur atau bahan-bahan terkait dengan penelitian.